

## KEWARGANEGARAAN DAN DILEMA MINORITAS PASCA KOLONIAL BERCERMIN KASUS SABAH DAN KESULTANAN SULU

Ahmad Suaedy  
AW Centre-Universitas Indonesia  
Email: [suaedy@gusdur.net](mailto:suaedy@gusdur.net)

### Abstract

This paper is aimed to understand the issue of citizenship and the post colonial minority dilemma by looking at the issue of Sabah and the Sultanate of Sulu. Unlike western countries whose states were formed based on their established historical territories, the formation of states in the east or non-western areas in general inherited complicated religious, ethnic, traditional rules and familial relations. Non-western post-colonial states should developed different conceptions of state-borders by considering traditional cultural realities, multicultural and plural ethnicities, languages and religions and family connections within each state or among several states. This re-definiton should not eliminate individual ownership but also to promote a vision of common welfare.

**Keywords:** Citizenship, Minority, Sabah, Sulu Sultanate

### PENDAHULUAN: PROBLEM KEWARGANEGARAAN DAN MINORITAS

Bagai geledek di siang bolong. Beberapa waktu lalu tiba tiba sepasukan kesultanan Sulu di bawah komando Raja Muda Agbimuddin Kiram adek dari Sultan Jamalu Kiram adik dari Sultan Jamalul Kiram III dari kesultanan Sulu yang kini merupakan bagian dari wilayah negara Republik Filipina menduduki sebuah daerah di Sabah yang merupakan negara bagian dari Federasi Malaysia. Banyak orang terpenjerat, ada apa dan apa latar belakangnya.

Tetapi kalau kita merefleksikan problematik batas wilayah (territorial integrity) dalam konsep negara\_negara (nation-state) di negara negara non-Barat maka tidak terlalu heran. Berbeda keadaannya dengan di barat, nasionalisme dan terbentuknya negara negara di timur atau negara negara bekas koloni Cenderung meninggalakn bom waktu. Di Barat, terbentuknya negara negara didasarkan pada pembagian wilayah teritori yang bersifat historis dan mapan. Sedangkan di Timur atau non-Barat pada umumnya, batas-batas Negara-negara didasarkan pada

pembagian wilayah jajahan atau koloni dan meninggalkan komplikasi hubungan agama,etnis,kekuasaan tradisional dan bahkan keluarga yang serius.

Ada wilayah yang semula mayoritas dan berkuasa tiba tiba menjadi minoritas dan subordinatif seperti terjadi pada Kesultanan Sulu dan posisi Sabah. Hal yang sama terjadi pada kesultanan Patani di Thailand Selatan, misalnya. Dua wilayah itu hanya Contoh dari banyak kasus di banyak negara pasa kolonial. Di sisi lain, kewarganegaraan dalam negara negara didasarkan pada paham individualistik konvensional sebagaimana karakter khas barat yang Cenderung homogen dengan mengabaikan hak kolektif (1995:57-58). Sementara karakter bangsa Timur pada umumnya adalah komunitarian yang memiliki hubungan kolektif yang sangat kuat dan dalam setiap wilayah selalu cenderung plural dan multikultural (KymliCka 2001). Problem mendasar di Negara-negara Timur pasca-kolonial adalah bagaimana memperlakukan komunitas-komunitas warganegara minoritas yang memiliki perbedaan mendasar budaya, bahasa, agama, dan etnis dari mayoritas seperti terjadi di Mindanao

Filipina dan Patani Thailand, dan juga sebagian wilayah bagian timur Indonesia.

Globalisasi dan demokratisasi telah mendorong makin menguatnya tuntutan minoritas di berbagai Negara, bukan hanya minoritas migran tetapi juga minoritas pribumi yang selama ini tertindas dalam Negara-negara tersebut. Bukan hanya disebabkan karena ketidakadilan dan terabaikannya hak-hak individu, melainkan juga hak-hak kolektif mereka sebagai minoritas (Kymlicka 1995). Demokrasi cenderung dihegemoni oleh mayoritas dalam masalah-masalah krusial seperti hak budaya, bahasa, etnis dan agama. Kasus pendudukan Kesultanan Sulu atas Sabah yang sesungguhnya sangat mustahil dan naif bias terjadi, tampaknya bukan satu-satunya kasus melainkan masih banyak ketegangan dan konflik warisan yang bermula dari terbentuknya Negara-negara yang belum selesai.

Tuntutan reformulasi batas-batas wilayah yang kini hanya berbasis pada batas teritorial yang menimbulkan banyak problem dan tuntutan dihormatinya posisi minoritas tersebut merupakan *trend* baru gerakan pasca liberalism berupa gerakan multikulturalisme dalam nasionalisme dan Negara-bangsa. Bahkan hal ini juga terjadi di Barat sendiri seperti pada kasus bangsa Skotlandia atas Inggris raya dan posisi minoritas Quebec di Kanada. Penyerangan Kesultanan Sulu ke Sabah merupakan kasus menarik untuk didiskusikan sebagai *trend* baru tersebut dan mungkin peringatan bagi Negara-negara non-Barat pasca-kolonial tentang berbagai problem yang mungkin muncul di masa depan.

## LATAR BELAKANG SEJARAH

Kesultanan Sulu berdiri pada pertengahan abad ke-15 setelah sekitar dua abad sebelumnya Islam masuk dan diperkenalkan di wilayah itu. Seabad kemudian, pertengahan abad ke-16, pasukan kerajaan Spanyol mendarat di wilayah yang sekarang disebut Filipina

untuk menjajah wilayah itu. Dakwah Islam sendiri waktu itu sudah sampai ke Manila di utara, ibu kota Filipina sekarang, kecuali kepulauan Mindanao yang mayoritas beragama Islam. Orang-orang Mindanao mengatakan, mereka berperang sepanjang empat abad penjajahan Spanyol menduduki wilayah Filipina tersebut.

Karena itulah, Kesultanan Sulu yang berpusat di pulau Sulu beribukota Jolo, berjarak semalam naik *boat* dari pulau induk Mindanao, tidak pernah merasa tunduk dan dijajah oleh Spanyol. Tetapi ketika Spanyol kalah perang dari Amerika Serikat dalam memperebutkan wilayah jajahan, dalam perjanjian penyerahan daerah jajahan di Paris 1898, Spanyol memasukkan keseluruhan Mindanao, termasuk Kesultanan Sulu, sebagai bagian dari wilayah Filipina yang diserahkan. Maka masyarakat dan Kesultanan Sulu marah dan menentanginya dan mereka menyebut penyerahan itu sebagai perampokan. Mereka mengklaim melanjutkan perang sepanjang setengah abad di bawah penjajahan Amerika. Calakanya, pada penyerahan kemerdekaan oleh AS kepada Filipina 1947, wilayah Mindanao termasuk Kesultanan Sulu, juga masuk di dalamnya (Tauzon 2008, Yegar 2002).

Sultan Sulu ketika itu mengirim surat tidak ikut dalam kemerdekaan Filipina dan ingin tetap di bawah penjajahan AS, tetapi diabaikan. Sekali lagi masyarakat Sulu meneruskan perjuangan kemerdekaan di bawah pemerintahan Filipina yang merdeka. Dalam pikiran orang Sulu tidak ikut Filipina makan akan menjadi Negara merdeka sendiri seperti Brunei Darussalam sekarang. Sebuah Negara kecil yang sangat kaya minyak di tengah-tengah Negara besar.

## SABAH: INGGRIS VERSUS KESULTANAN SULU

Ketika itu Borneo Utara yang sekarang Sabah dan Sarawak adalah wilayah

Kesultanan Sulu setidaknya sampai 1878, dalam waktu yang sama Inggris sedang menjajah wilayah daratan yang berseberangan dengan Borneo dibatasi oleh luar. Untuk menghindari konfrontasi dan pencaplokkan oleh Inggris maka wilayah Sabah disewakan kepada perusahaan yang di bawah penjajahan Inggris milik Von Overbeck dan Dent, ditandatangani 1878 tersebut.

Model konsesi yang sama terhadap Inggris terjadi pada wilayah kesultanan Patani yang ketika itu di bawah control kerajaan Siam, seperti Perlis dan Kelantan sekarang juga menjadi Negara bagian Federasi Malaysia. Penggabungan Sabah dan juga Sarawak ke dalam Federasi Malaysia 1963 sama sekali mengabaikan perjanjian sewa antara Kesultanan Sulu dan perusahaan Inggris tersebut. Sehingga Kesultanan Sulu sampai sekarang masih mengklaim pemilik sah wilayah Sabah dan hanya disewa oleh Inggris yang kemudian dialihkan kepada Federasi Malaysia.

### **KEBIJAKAN MIGRASI AMERIKA SERIKAT-FILIPINA DAN PENGALIHAN HAK TANAH**

Selama penjajahan atas Filipina, Amerika memberlakukan kebijakan migrasi guna membangun perkebunan dan pertanian di wilayah Mindanao yang waktu itu masih kosong dan jarang penduduknya. Para migran itu adalah penduduk Filipina Tengah dan Itara yang miskin dan mayoritas Katolik. Selama 1898-1947 penduduk Mindanao yang semula lebih dari 80 persen Muslim dan selebihnya sedikit Katolik dan indogenous people atau di Mindanao disebut Lumad, tinggal 50 persen karena besarnya migrasi. Program migrasi itu dilanjutkan oleh pemerintah Filipina pasca kemerdekaan dengan angka yang lebih fastastis. Tahun 1947-1970an penduduk Muslim di Mindanao tinggal 17 persen dan 10 persen Lumad, selebihnya migran beragama Katolik (Tauzon 2008).

Problemnya kemudian bukan hanya karena kedatangan dan jumlah migran yang besar melainkan dalam waktu yang sama terjadinya pengalihan kepemilikan tanah secara besar-besaran, dengan cara sah maupun tidak sah, serta berdirinya berbagai fasilitas Gereja dan pendidikan umat Katolik. Sementara pusat-pusat perkebunan menerima pekerja para migran dan sekolah yang terbaik menerima anak-anak mereka, maka penduduk asli yang sebagian besar Muslim terpinggirkan baik sebagai pekerja maupun akses pendidikan terbaik (Wilson 2009). Penduduk asli Muslim umumnya resisten terhadap sekolah Katolik dan juga sekolah sekuler pemerintah. Jadilah proses marginalisasi dan bahkan seorang professor di Mindanao State University, Iligan City, B.R. Rodil menyebutnya sebagai terjadinya proses *minoritization* (Rodil 1994, 2003).

Pada tahun 1968 terjadi pembantaian terhadap sejumlah calon tentara ada yang menyebut 60an orang dan ada pula yang menyebut 30an orang, yang seluruhnya berasal dari Sulu karena direkrut untuk kepentingan khusus oleh Angkatan Perang Filipina. Yaitu, untuk membebaskan Sabah dari Federasi Malaysia dan dikembalikan ke pangkuan Filipina karena wilayah itu dianggap milik Kesultanan Sulu dan dengan sendirinya adalah milik Filipina.

Setelah di-kamp beberapa bulan dan dilatih oleh Angkatan Perang Filipina di bawah komandan seorang Katolik, tiba saatnya diterjunkan untuk membebaskan Sabah. Ternyata, mereka seluruhnya menolak untuk menyerbu Sabah karena mereka menganggap bahwa penduduk Sabah adalah saudara mereka, memiliki hubungan keluarga, historis, sesama etnis Melayu, Muslim dan di bawah Kesultanan Sulu. Mereka lebih dekat dalam semua aspek dengan penduduk Sabah ketimbang dengan Filipina Tengah dan Utara bahkan dengan pemerintah pusat. Karena itu tidak mungkin mereka bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Perlu diketahui bahwa pulau Sulu dan Tawi-Tawi yang

bersebelahan lebih dekat dengan Sabah ketimbang dengan Filipina Tengah dan Utara dan bahkan dengan penduduk pulau induk Mindanao. Akibatnya melakukan apa yang menjadi tugas mereka sebagai tentara maka mereka dibantai seluruhnya yang kemudian terkenal dengan ‘*Jabidah massacre*’. Tetapi, ada satu orang yang melarikan diri dan selamat dan mengadukan kasusnya kepada media: Terbongkar!(Yegar 2002).

### TUNTUTAN MERDEKA

Terbongkarnya pembantaian Jabidah membangkitkan nasionalisme Mindanao untuk merdeka dan berpisah dari Filipina. Muncul tokoh pemersatu yang ketika itu seorang professor di *Islamic Studies University of the Philippines*, yaitu Nur Misuari dengan wakilnya Hasyim Salamat yang merupakan alumni Al-Azhar, Mesir. Berdirilah organisasi modern *Moro National Liberation Front* (MNLF) untuk menuntut kemerdekaan Mindanao. Julukan ‘*Moro*’ yang ketika itu merupakan penghinaan terhadap orang Muslim yang berasal dari bahasa Spanyol, kemudian dikukuhkan menjadi simbol menjadi simbol kebanggaan dan perjuangan: Bangsa Moro.

Tetapi, presiden Ferdinand Marcos tidak mau kehilangan muka dengan memberlakukan UU Darurat 1970 yang memungkinkan untuk mengerahkan seluruh kekuatan untuk memberantas yang dianggap sebagai separatis. Menurut sebagian orang Mindanao, sepanjang perang lima abad sejak masuknya Spanyol, belum pernah Mindanao serusak ketika masa UU Darurat tersebut. Karena, tentara Filipina tidak hanya menyerang pasukan MNLF, tetapi juga rakyat sipil, masjid dan madrasah.

Meskipun korban berjatuhan di kedua belah pihak tetapi akhirnya mencapai suatu perjanjian damai MoA (Memorandum of Agreement) pada tahun 1979 antara MNLF dan pemerintah Filipina

yang difasilitasi oleh Libya di bawah presiden Mohamad Khoadafi yang ketika itu Ketua OKI di Tripoli. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa sementara pemerintah Filipina akan memberikan otonomi wilayah mayoritas Muslim di Mindanao kepada MNLF sebagai representasi Moro, maka MNLF menarik tuntutan merdeka dengan beralih pada tuntutan otonomi dengan batas-batas wilayah yang telah disepakati yang realisasinya akan dibicarakan lebih lanjut.

Kesepakatan itu rupanya tidak bulat, sehingga dengan dipimpin oleh Hasyim Salamat, wakil Nur Misuari sendiri di MNLF, mereka pecah dan hamper separuh jumlah pendukung dan pasukan MNLF berpindah ke organisasi pecahan yaitu *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Malaysia diduga terlibat dalam berdirinya MILF karena Nur Misuari telah mengagendakan, jika MNLF merdeka atau otonomi akan mengembalikan Sabah ke pangkuan Sulu atau Mindanao. Sedangkan MILF menolak kompromi dan tetap menuntut merdeka serta tidak mau ikut dalam struktur pemerintahan apapun (Tauzon 2008). Di lain sisi, MoA itu sendiri gagal diimplementasikan setidaknya karena tiga hal: pertama, karena Marcos mengeluarkan kebijakan baru tentang pembagian regional seluruh Filipina dimana Mindanao dibagi menjadi dua region. Fakta ini mengacaukan klaim MNLF atas otonomi wilayah di Mindanao yang telah disebut secara jelas dalam MoA Tripoli. Kedua, pemerintah pusat mensyaratkan realisasi otonomi itu melalui referendum berbasis kabupaten/kota yang tidak ada di dalam MoA. Ketiga, Marcos juga menggunakan kepala-kepala adat untuk memecah belah kepemimpinan Misuari di MNLF di samping berdirinya MILF. Meski, demikian implementasi otonomi melalui referendum tersebut dipaksakan oleh Marcos dengan mengabaikan protes baik MNLF maupun MILF.

Ketegangan dan perang kembali tidak terelakkan, tetapi Presiden Corazon Aquino menarik mereka kembali ke meja perundingan. Dengan difasilitasi Indonesia, terjadilah kesepakatan tahun 1989 tentang implementasi atas MoA yang gagal di bawah Marcos. Namun, lagi-lagi kesepakatan itu gagal direalisasikan karena pemerintah pusat kembali mensyaratkan adanya referendum yang juga ditolak oleh MNLF, namun plebisit tetap dipaksakan berjalan dan di bawah suatu institusi otonomi berdasarkan UU yang dikeluarkan oleh Kongres, yaitu ARMM (*Autonomous Region in Muslim Mindanao*).

Referendum ARMM yang berbasis pada kabupaten/kota membuat wilayah ARMM yang berbasis pada kabupaten/kota membuat wilayah ARMM sungguh rumit. Ada provinsi yang bergabung ke dalam ARMM tetapi sejumlah kabupaten dan kota dan bahkan ibukota provinsi itu sendiri tidak ikut di dalamnya. Hal ini seperti terjadi pada Kotabato sebagai ibukota provinsi Magindanao dan Isabela sebagai salah satu kota di bawah provinsi Sulu (kini ibukota provinsi basilan). Sementara provinsi Magindanao ikut dalam ARMM maka Kotabato sebagai ibukota provinsi tidak ikut. Anehnya ibukota ARMM sendiri berada di Kotabato yang notabene bukan wilayah ARMM. Dari hasil referendum itu memang bias ditebak bahwa kabupaten/kota yang penduduknya fifty-fifty atau lebih sedikit Islam atau Katolik umumnya tidak bergabung dengan ARMM, hanya ikut ke dalamnya. Kerumitan itu juga terjadi pada penyelenggaraan pemilihan umum yang berbeda jadwal dengan pemilihan umum nasional (Yegar 2002).

Meski demikian, kira-kira tujuh tahun kemudian Presiden Fidel Ramos berhasil membawa Nur Misuari ke pangkuan ARMM dengan janji dikembalikannya klaim wilayah otonomi yang tercantum di dalam MoA Tripoli 1979 dan didukung untuk menjadi gubernur dalam pemilu ARMM. Namun, bulan madu Ramos dengan MNLF-Misuari tidak

berlangsung lama karena ternyata budget ARMM yang diajukan gubernur Misuari hanya dikabulkan sebagian sehingga Misuari tidak bisa melakukan pembangunan apapun selain biaya rutin seperti gaji dan operasional pemerintahan. Banyak penulis mengkritik Misuari sebagai gubernur yang nepotism dan korupsi, namun kenyataannya bahwa dengan berbagai alasan antara lain karena krisis moneter Asia 1997 dan karena budget secara nasional sudah ditetapkan sebelumnya sehingga tidak mungkin mengabulkan seluruh permintaan ARMM di bawah Misuari, budget ARMM tidak didukung sepenuhnya. Misuari kehilangan kesabaran sehingga terjadi kekerasan yang dalam penyelidikan intelegen mengarah kepada keterlibatan Misuari sebagai gubernur. Misuari akhirnya dipenjara karena itu (Yegar 2002).

Sesungguhnya pemerintah pusat Filipina tidak memutuskan hubungan dengan MILF. Pada tahun 2003 dengan kembali difasilitasi oleh Libya terjadi penandatanganan MoA di Tripoli antara pemerintah Filipina di bawah presiden Gloria Macapagal dengan MILF. Isinya antara lain adalah bahwa MILF menarik tuntutan merdeka dan beralih ke otonomi serta melanjutkan perundingan bentuk otonomi yang kemudian disebut sebagai MoA-AD (*Memorandum of Agreement on Ancestral Domain*) (Tumirez 2007: Williams 2010). Perundingan MoA –AD gagal ditahun 2009 tetapi kemudian direvisi dan disepakari pada Oktober 2012 atas fasilitasi Malaysia dan organisasi organisasi *civil society* di dunia.

Pada awal tahun 2010, saya bertemu baik pemimpin tertinggi MNLF Nur Misuari dan kelompok MNLF oposisi Misuari, Muslimin Semma yang tinggal dan suku Magindanao maupun pemimpin tertinggi MILF Ir. Ibrahim Murod pengganti Hasyim Selamat di Camp Abu Bakar yang dijaga ketat. Saya juga bertemu dengan pemimpin oposisi terhadap Ibrahim Murod di MILF yang bersuku Tausug. Nur

Misuari ketika itu masih berharap bias memperoleh kembali kekuasaan di ARMM, sedangkan oposisinya mengatakan akan ikut siapa saja yang akan memperoleh hak lebih luas untuk kepentingan Moro. Ibrahim menyatakan bahwa MoA-AD ini adalah sikap paling reformis dari MILF dan tidak bias lebih reformis lagi. Pilihan lainnya adalah kembali ke separatis atau medan perang. Sementara pihak oposisi Ibrahim menolak kompromi karena kemerdekaan adalah harga mati.

Dua kali juga penulis bertemu dengan Nur Misuari sebelum ditandatangani MoA MILF- pemerintah Filipina 2012 dan dua kali pula pasca penandatanganan itu, di Jakarta dan di Manila. Pada dua kali pertemuan sebelum penandatanganan MoA itu, tampaknya Misuari masih berharap bahwa MNLF bias menguasai lagi ARMM dan bahkan Misuari menyatakan bahwa draf RUU tengah dibahas di Kongres untuk memperbaharui eksistensi ARMM. Namun dua kali bertemu pasca MoA 2012, Nur Misuari tampak frustrasi dan tidak punya pilihan lain kecuali mungkin akan berhasil frontal karena ARMM praktis telah diambil alih oleh MILF.

Dalam MoA 2012 tersebut, ARMM memang dilebur menjadi bagian dari wilayah otonomi versi MILF. Praktis terjadi pengalihan penguasaan otonomi dari MNLF ke MILF tanpa mengikutkan pembicaraan MNLF di dalamnya. Pada akhir November 2012 saya berkesempatan ke Manila dan Mindanao termasuk Basilan: baik Nur Misuari dan para pendukungnya mengaku tidak pernah diajak bicara tentang pembicaraan dan negosiasi dalam MoA MILF yang ditandatangani Oktober 2012 tersebut. Sedangkan oposisinya menyatakan akan bergabung dengan MoA tersebut. Hal yang patut dipertanyakan adalah peran pemerintah Indonesia karena Indonesia adalah mediator realisasi ARMM, sementara kini diambil alih oleh Malaysia melalui MILF.

## ADA APA DENGAN MNLF DAN MILF?

Sesungguhnya perbedaan MNLF dan MILF bukan hanya dalam organisasi dan ideology tetapi juga berbeda dalam basis etnis dan legitimasi serta pusat konsolidasi. Baik MNLF maupun MILF semula adalah organisasi modern yang dipimpin oleh para terdidik dan bersifat meritokrasi sebagai kritik terhadap kepemimpinan tradisional di Mindanao yang feodal dan dinastik. Tetapi ketika keduanya terdesak oleh realitas arus politik maka mereka mencari legitimasi tradisonalnya masing-masing, yaitu basis etnis dan kesultanan. Sementara MNLF berbasis di Sulu dengan etnis Tausug dan kesultanan Sulu, maka MILF berbasis pada etnis Magindanao di pulau induk Mindanao yang berbasis pada kesultanan Magindanao. Dengan demikian, kini MNLF dan MILF berhadapan bukan hanya dalam ideology dan agenda melainkan juga dalam perbedaan etnis, legitimasi kesultanan dan pusat konsolidasi yang berbeda. Secara geografis letak kesultanan Magindanao lebih dekat dengan pemerintah pusat tetapi secara historis Sulu lebih terhormat dan tua karena kesultanan Magindanao baru berdiri di abad ke-19.

Dengan akomodasi pemerintah pusat Filipina terhadap MILF-suku Magindanao-kesultanan Magindanao dan memasukkan ARMM yang notabene "milik" MNLF-suku Tausug-kesultanan Sulu tanpa konsultasi dan pelibatan mereka dalam pembicaraan maka praktis etnis Tausug yang juga MNLF dan masyarakat serta keseluruhan Sulu kehilangan harapan dalam arti keseluruhan, termasuk untuk bisa merebut kembali Sabah suatu ketika. Sementara pemerintah pusat mengabaikan, baik dalam pembangunan maupun peningkatan kesejahteraan rakyat dan kehormatan keluarga Kesultanan Sulu. Mereka bukan hanya minoritas agama dan etnis di negerinya sendiri Filipina tetapi

juga sangat jauh dari pusat dalam arti segalanya, jarak, pembangunan dan pemanusiaan.

Serangan ke Sabah, dengan demikian, boleh jadi adalah outlet dari frustrasi ini. Targetnya mungkin bukan ingin menguasai Sabah apalagi merebut dari Malaysia saat ini, tetapi tidak lebih dari mencuri perhatian dunia dari ketertindasan dan minoritisasi oleh pemerintah pusat Filipina, pengabaian dalam otonomi Mindanao dalam MoA 2012 dan keterasingan dari dunia luar.

### **ANALISIS: PERLU NYA PERUBAHAN RADIKAL**

Nasionalisme dalam Negara-bangsa yang mengangungkan territorial integrity sebagai satu-satunya definisi batas wilayah adalah warisan colonial yang manipulatif, diciptakan dalam rangka keserakahan colonial yang menabrak batas-batas persaudaraan serumpun sesame etnis, agama, keluarga dan kekuasaan tradisional yang historis. Sementara pluralitas anggota warganegara di dalamnya dipaksakan penyeragaman sebagai satu kesatuan dalam suatu system asimiliasi dengan menghilangkan perbedaan dan keragaman.

Kesultanan Sulu, dan tentu saja bangsa Moro di Mindanao pada umumnya, adalah salah satu tradisi local yang termarginalisasi dan terminoritisasi bukan saja karena jarak yang jauh dari pusat, tetapi juga terabaikan tentang kehidupan ekonomi dan kehangatan hubungan sebagai sesame bangsa Republik Filipina. Sementara mereka tertutup untuk berhubungan secara sejajar dan hangat dengan saudara kekuasaan tradisional dan keluarga serta kedekatan wilayah baik dengan Sabah maupun Brunei. Kedekatan hubungan mereka dalam hampir semua hal sedekat hubungan penduduk di perbatasan Timor Leste-Indonesia di pulau Timor yang sesame Katolik, etnis Timor, hubungan keluarga dan tradisi local yang kuat.

Hanya karena mereka tergabung secara terpaksa dengan bangsa yang berbeda dalam Negara-bangsa pasca colonial maka mereka harus menanggung jarak kesejahteraan hidup yang begitu mencolok dengan saudaranya serumpun sesame etnis, seagama, pengalaman historis yang panjang dan bahkan keluarga di Sabah dan Brunei. Harapan yang punah, pengabaian eksistensi dalam membangun MoA 2012 atas nasib mereka di masa depan yang sangat panjang, serta keacuhan terhadap kemiskinan dan jarak distribusi ekonomi di wilayah di negaranya, membuat frustrasi tidak terbandung.

Dengan latar belakang semacam itu rasanya tak pantas Negara semakmur seperti Malaysia alih-alih membantu membangun kepercayaan diri untuk terhindar dari frustrasi dan memediasi untuk bias meraih hak-hak mereka secara wajar, dengan entengnya justru mengusulkan mereka sebagai teroris hanya karena ada ideology batas wilayah Negara di situ. Rasanya harus ada perubahan visi yang radikal atas konsep Negara-bangsa pasca colonial di Negara-negara non-Barat setidaknya di Asia tenggara, jika diinginkan terbangun suatu kesejahteraan yang merata dan terciptanya kawasan yang damai. Tidak hanya dalam wilayah serumpun Melayu tetapi juga serumpun sesame penghuni kawasan Asia Tenggara itu sendiri, termasuk di mainland Indochina seperti Thailand-Kamboja yang sempat bentrok di perbatasan.

### **REKOMENDASI**

Negara-negara non-Barat pasca colonial selayaknya membangun sendiri definisi batas-batas itu yang berbasis pada realitas kultural tradisional, multicultural dan pluralitas etnis, bahasa dan agama, serta hubungan persaudaraan dan keluarga, baik ke dalam Negara itu sendiri dan antar Negara. Redefinisi itu tentu saja dengan tidak menghilangkan hak milik masing-masing tetapi justru untuk suatu visi

distribusi kemakmuran bersama. Meskipun Ben Anderson memuji setinggi langit nasionalisme Indonesia dan Asia Tenggara, misalnya yang plural dan multicultural sebagai *imagined communities*, yaitu meskipun terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan kepulauan tetapi berhasil membangun suatu kesatuan bangsa. Tetapi tidak bias melupakan tentang otoritarianisme Orde Baru Indonesia sebagai bagian dari hegemoni colonial dan Barat, dan juga otoritarianisme yang sama di Negara-negara Asia Tenggara atas rakyatnya, yang memaksakan keseragaman dengan mengabaikan dan bahkan penghilangan ciri-ciri khas local serta egoisme sektoral masing-masing Negara. Kini ciri-ciri itu mulai muncul berupa ketegangan yang laten di banyak wilayah, seperti terjadi pada kasus Keistimewaan Yogyakarta. Maka perlu pengaturan yang berbasis pada realitas plural dan multikultural bangsa itu sendiri dan juga dalam kawasan Asia Tenggara, bukannya pemaksaan dengan penyeragaman dan mengikuti doktrin colonial tanpa *reserve*.

Peringatan keras harus diberikan kepada kebijakan pemerintah, khususnya Indonesia yang lebih mengakomodasi kultur dan ideology yang dating dari luar dan bahkan dengan membiarkan munculnya cara-cara kekerasan dan penyerangan ketimbang memberdayakan dan perlindungan terhadap budaya dan tradisi local yang tertindas. Pada titik tertentu, pembiaran ini di samping akan menggilas tradisi-tradisi local yang khas juga akan menimbulkan tradisi kebencian antar kelompok bangsa dan itu berarti ancaman terhadap eksistensi bangsa itu sendiri. Lebih dari itu adalah adanya ancaman kepunahan tradisi budaya pribumi dan dengan itu sebuah bangsa akan kehilangan tradisi dan peradabannya sendiri.

Dalam demokrasi Negara-bangsa yang melandaskan pada hak-hak individu yang berlebihan selalu terjadi hegemoni

oleh mayoritas. Penghormatan terhadap hak-hak budaya dan tradisi sebagai hak kolektif, dengan demikian, harus menjadi arah baru konsep kewarganegaraan dalam demokrasi pasca colonial di Negara-negara no-Barat sebagai strategi perdamaian dan pemerataan kemakmuran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kymlicka, Will, *Multicultural Citizenship: Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Oxford University press, 1995
- Kymlicka, Will *es al. ed., Can Liberal Pluralism be Exported? Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe*. New York: Oxford University Press, 2001
- Rodil, B. R., *The Minoritization of the Indigenous Communities of the Mindanao and The Sulu Archipelago*, Davao City, AFRM, 1994
- Rodil, B.R., *A Story of Mindanao and Sulu in Question and Answer*, Davao City, Mindcode, 2003
- Tauzon, Bobby M., *The Moro Reader: History and Contemporary Struggles of the Bangsamoro people*, Quezon city Manila, Policy Study Publication and Advocacy (PSPA)-Center for People Empowerment in Governance (CenPEG), 2008
- Tuminez, Astrid S., "The Land is Our Land: Moro Ancestral Domain and its Implications for Peace and Development in gthe Southern Philippines," *SAIS Review*, 27,2 Summer-Fall 2007:77-91.
- Williams, Timothy, "The MoA-AD Debacle- AN Analysis of Individuals Voice , Provincial Propoganda and National Interest," *Journal of Current Southeast Asia Affairs*, 1, 2010:121-144.
- Wilson Jr., MAJ Thomas G. *Extending Autonomous Region In Muslim*



*Mindanao to the Moro Islamic  
Liberation  
Front a Catalyst for Peace: Monograph,*  
Kansas, School of Advance Military  
Studies US Army Command  
and General Staff College Fort  
Leavenworth, 2009

Yegar, Moshe, *Between Integration and  
Secession: The Muslim Communities  
of the Southern Philippines, Southern  
Thailand, and Western Burma/Myanmar,*  
Maryland: Lexington Books, 2002